

**PENGARUH BELANJA MODAL, DANA ALOKASI UMUM, DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI KABUPATEN/KOTA TIGA PROVINSI
DI PULAU SUMATERA**



Skripsi Oleh:

ADINDA DWI AMALIA

01021281621247

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2020

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPERHENSIF

ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL, DANA ALOKASI UMUM, DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
KABUPATEN/KOTA TIGA PROVINSI DI PULAU SUMATERA

Disusun oleh:

Nama : Adinda Dwi Amalia
NIM : 01021281621247
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komperhensif

TANGGAL PERSETUJUAN

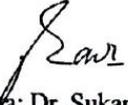
DOSEN PEMBIMBING

Tanggal: 23 Desember 2019


Ketua: Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si

NIP. 197007162008012015

Tanggal: 29/1/2020


Anggota: Dr. Sukanto, S.E., M. Si

NIP. 197403252009121001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH BELANJA MODAL, DANA ALOKASI UMUM, DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI KABUPATEN/KOTA TIGA PROVINSI
DI PULAU SUMATERA**

Disusun oleh:

Nama : Adinda Dwi Amalia
NIM : 01021281621247
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 5 Maret 2020 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 5 Maret 2020

Ketua

Anggota

Anggota



Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015



Dr. Sukanto, S.E., M.Si
NIP. 197403252009121001



Imelda, S.E., M.S.E
NIP. 197703092009122002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 19730406201012001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adinda Dwi Amalia

NIM : 01021281621247

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian : Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul Pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tiga Provinsi di Pulau Sumatera

Pembimbing :

Ketua : Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si

Anggota : Dr. Sukanto, S.E, M. Si

Tanggal Ujian : 5 Maret 2020

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, 5 Maret 2020

Pembuat pernyataan,


Adinda Dwi Amalia

NIM. 01021281621247

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian Skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tiga Provinsi di Pulau Sumatera”. Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

Skripsi ini membahas Pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tiga Provinsi di Pulau Sumatera. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, tidak luput dari berbagai kendala dan kesulitan. Namun pada akhirnya dapat diselesaikan dengan berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak.

Indralaya, 6 Maret 2020

Adinda Dwi Amalia

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pengaruh Belanja Modal, Dana Alokas iUmum, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tiga Provinsi di Pulau Sumatera*” yang digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S1) jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Selama proses penyusunan skripsi ini berbagai hambatan yang dihadapi penulis. Hambatan tersebut dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Mukhlis, S.E, M.Si selaku ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Dosen pembimbing skripsi selaku Pembimbing I sekaligus dosen pembimbing akademik Ibu Dr. Hj. Anna Yulianita,S.E., M.Si yang telah mengorbankan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing saya dan

memberikan saran dalam menyelesaikan kendala akademik sekaligus skripsi saya.

6. Dosen pembimbing skripsi selaku Pembimbing II Bapak Dr. Sukanto, S.E, M.Si yang telah mengorbankan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen penguji Ibu Imelda, S.E, M.S.E. yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat membantu bagi perbaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya khususnya para dosen jurusan Ekonomi Pembangunan, terima kasih yang tak terhingga untuk ilmu pengetahuan, pembelajaran, pengalaman serta nasihat yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
9. Kedua orangtua saya tercinta yaitu Mama (Yusnidar) dan Papa (Agustan) yang senantiasa selalu memanjatkan doa dan memberikan semangat, dukungan, nasihat, motivasi dan pengorbanan baik moril maupun materiil dengan penuh kasih sayang yang tiada hentinya yang tentunya sangat berarti dan menjadi kekuatan bagi penulis selama ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang dan kebahagiaan untuk kalian. Amin.
10. Saudara perempuan saya tercinta (Kakak) Rizky Martha Amelia, S.Sos yang selalu memberi semangat sekaligus menjadi motivator saya dalam keadaan apapun, semoga kita menjadi orang yang sukses. Amin. Dan untuk kakak ipar saya Kak Andri Kurniawan, S.T yang juga selalu memberi semangat dan motivasi.

11. Para Staf dan Karyawan-Karyawati Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya khususnya Kak Heru, Mba Narti, Mba Sumi, Kak Ijal, Mba Dwi, Kak Deri terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya selama ini yang sangat membantu dalam menyelesaikan segala urusan perkuliahan di kampus Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
12. Sahabat terbaik saya “Beb Squad” Eva Purnama Sari, WikaIndriani, Eliza Oktapia, Tri Anggriyani, Endang Nopita Sari danYeni Indraini yang telah mengisi kenangan dari wal yang masih menjadi mahasiswa baru sampai sekarang yang satu-persatu mulai akan berpisah. Semoga kelak kita semua akan sukses dan persahabatan ini untuk selamanya.
13. Rekan-rekan sesama konsentrasi Keuangan Daerah 2016 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang menemani dan saling berbagi pengalaman selama masa perkuliahan.
14. Rekan- rekan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2016 yang menemani dan saling berbagi pengalaman selama masa perkuliahan. Semoga kita semua kelak akan berhasil. Amin
15. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini

Indralaya, 6 Maret 2020

Adinda Dwi Amalia

ABSTRAK

Pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tiga Provinsi di Pulau Sumatera

Oleh:

Adinda Dwi Amalia; Hj. Anna Yulianita; Sukanto

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tiga Provinsi di Pulau Sumatera. Data yang digunakan berupa data sekunder selama periode 2013-2017 bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) dan Badan Pusat Statistika (BPS). Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel yang diestimasi dengan model *Fixed Effect*. Hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tiga Provinsi di Pulau Sumatera. Sementara itu, Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tiga Provinsi di Pulau Sumatera.

Kata Kunci : *Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Fixed Effect*

Ketua

Anggota



Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015



Dr. Sukanto, S.E., M.Si
NIP. 197403252009121001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 19730406201012001

ABSTRACT

The Effect of Capital Expenditure, General Allocation Fund, and Locally-Generated Revenue on Economic Growth of Regencies/Cities in Three Provinces in Sumatra Island

By:

Adinda Dwi Amalia; Hj. Anna Yulianita; Sukanto

This study aimed to analyze the effect of Capital Expenditure, General Allocation Fund, and Locally-Generated Revenue on Economic Growth of Regencies/Cities in Three Provinces in Sumatra Island. The data used in this study were secondary data from 2013 to 2017 obtained from Directorate General of Financial Balance (*DJPK*) and Central Bureau of Statistics (*BPS*). The analytical method used in this study was panel data regression estimated by the Fixed Effect model. The results of panel data regression showed that Capital Expenditure and Locally-Generated Revenue had positive and significant effect while General Allocation Fund had negative and significant effect on Economic Growth of Regencies/Cities in Three Provinces in Sumatra Island.

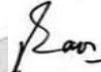
Key words: Capital Expenditure, General Allocation Fund, Locally-Generated Revenue, Economic Growth, Fixed Effect

Chairman,



Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si.
NIP. 197007162008012015

Member,



Dr. Sukanto, S.E., M.Si.
NIP. 197403252009121001

Approved by,
Head of Development Economics Program



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si.
NIP. 197304062010121001



This is a true and correct translation of the original copied document,
Head of Technical Implementation Unit for Language
Universitas Sriwijaya

Bambang A. Loeneto, M.A., Ph.D.
NIP.19550413 198403 1 001

AW/03.20

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Adinda Dwi Amalia
NIM : 01021281621247
Tempat/Tanggal Lahir: Palembang/ 7 Juni 1998
Alamat : Perumahan Alam Indralaya
Lestari Blok B No. 5 RT/RW 011/000 Kel. Tanjung
Seteko Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir
No Handphone : 0895631075480
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
E-mail : adindadwiamalia1@gmail.com



Pendidikan Formal

Sekolah Dasar:SD Negeri 03 Indralaya Selatan

SLTP : SMP Negeri 1 Indralaya

SLTA :SMANegeri 1 Indralaya

Strata-1 : Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas
Sriwijaya

Pengalaman Organisasi

1. Staf Muda Dinas Hubungan Internal BEM KM FE UNSRI Kabinet Solid 2016-2017.
2. Staf Ahli Dinas Sosial dan Lingkungan BEM KM FE UNSRI Kabinet Sinergi Tahun 2017-2018.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMA KASIH	ii
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	v
ABSTRAK (BAHASA INGGRIS)	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LatarBelakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Teori Pengeluaran Pemerintah	14
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	15
2.1.3 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal	19
2.1.4 Belanja Modal	20
2.1.5 Dana Alokasi Umum.....	20
2.1.6 Pendapatan Asli Daerah	21
2.2 Penelitian Terdahulu	21
2.3 Kerangka Pikir.....	23
2.4 Hipotesis	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	26
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	26
3.3 Teknik Analisis	27
3.3.1 Perumusan Model	27
3.3.2 Metode Regresi Data Panel	28
3.3.3 Pemilihan Teknik Estimasi.....	29
1) Uji Chow.....	29
2) Uji Hausman	29
3.3.4 Uji Asumsi Klasik.....	30
3.3.4.1 Uji Multikolinearitas	30
3.3.4.2 Uji Autokorelasi.....	31
3.3.4.3 Uji Heterokedastisitas	31
3.3.5 Uji Hipotesis	31
1. Pengujian Secara Serempak	31
2. Pengujian Secara Parsial	32

3.4 Definisi Operasional Variabel.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	34
4.1.1 Kondisi Geografis	34
4.1.2 Perkembangan BM Tiga Provinsi di Pulau Sumatera	38
4.1.2.1 Perkembangan BM Provinsi Sumatera Barat	38
4.1.2.2 Perkembangan BM Provinsi Jambi	40
4.1.2.3 Perkembangan BM Provinsi Bengkulu	41
4.1.3 Perkembangan DAU Tiga Provinsi di Pulau Sumatera	43
4.1.3.1 Perkembangan DAU Provinsi Sumatera Barat	43
4.1.3.2 Perkembangan DAU Provinsi Jambi.....	44
4.1.3.3 Perkembangan DAU Provinsi Bengkulu	46
4.1.4 Perkembangan PAD Tiga Provinsi di Pulau Sumatera.....	47
4.1.4.1 Perkembangan PAD Provinsi Sumatera Barat.....	47
4.1.4.2 Perkembangan PAD Provinsi Jambi	49
4.1.4.3 Perkembangan PAD Provinsi Bengkulu.....	50
4.2 Hasil Penelitian Estimasi Regresi Data Panel.....	51
4.2.1 Estimasi Model Data Panel	51
4.2.1.1 Hasil Estimasi Regresi dengan <i>CommonRandom Effect</i> ...	52
4.2.1.2 Hasil Estimasi Regresi dengan <i>CommonFixed Effect</i>	53
4.2.1.3 Hasil Estimasi Regresi dengan <i>CommonRandom Effect</i> ...	55
4.2.2 Pemilihan Model Estimasi Data Panel.....	55
4.2.2.1 Uji Chow	55
4.2.2.2 Uji Hausman	56
4.3 Pemilihan Model Akhir	58
4.4 Uji Asumsi Klasik	60
4.4.1 Uji Multikolinearitas.....	60
4.4.2 Uji Autokorelasi	60
4.4.3 Uji Heterokedastisitas.....	61
4.5 Uji Hipotesis	62
4.5.1 Uji F	62
4.5.2 Uji t	63
4.6 Pembahasan.....	65
4.6.1 Pengaruh BM terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	65
4.6.2 Pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi	66
4.6.3 Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi	67
4.7 Analisis Intersep Pertumbuhan Ekonomi	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran-Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK di Pulau Sumatera Periode 2013- 2017 (Persen)	3
Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK di Provinsi Sumatera Barat Periode 2013-2017 (Persen)	6
Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK di Provinsi Jambi Periode 2013-2017 (Persen)	6
Tabel 1.4 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK di Provinsi Bengkulu Periode 2013-2017 (Persen)	7
Tabel 4.1 Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017 (Miliar Rupiah)	44
Tabel 4.2 Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Umum Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 (Miliar Rupiah)	45
Tabel 4.3 Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2013-2017 (Miliar Rupiah)	47
Tabel 4.4 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017 (Miliar Rupiah)	48
Tabel 4.5 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 (Miliar Rupiah)	50
Tabel 4.6 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013-2017 (Miliar Rupiah)	51
Tabel 4.7 Hasil Estimasi Regresi dengan Metode Pooled Least Square	52
Tabel 4.8 Hasil Estimasi Regresi dengan Metode <i>Fixed Effect</i>	53
Tabel 4.9 Hasil Estimasi Regresi dengan Metode <i>Random Effect</i>	55
Tabel 4.10 Hasil Regresi dengan Uji Chow	56
Tabel 4.11 Hasil Regresi dengan Uji Hausman	57
Tabel 4.12 Hasil Estimasi <i>Fixed Effect Model</i>	58
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas dengan <i>Correlation Matrix</i>	60
Tabel 4.14 Hasil Heterokedastisitas	61
Tabel 4.15 Uji F	62
Tabel 4.16 Hasil Pengujian Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)	63
Tabel 4.17 Hasil Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)	64
Tabel 4.18 Intercep antar Kabupaten/Kota Tiga Provinsi di Pulau Sumatera	69

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Realisasi Belanja Modal Menurut Tiga Provinsi di Pulau Sumatera (miliar rupiah) Tahun 2013-2017	8
Gambar 1.2 Realisasi Dana Alokasi Umum Menurut Tiga Provinsi di Pulau Sumatera (miliar rupiah) Tahun 2013-2017	10
Gambar 1.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Menurut Tiga Provinsi di Pulau Sumatera (miliar rupiah) Tahun 2013-2017.....	11
Gambar 2.1 Teori Hukum Wagner	14
Gambar 2.2 Teori Peacock dan Wiseman	15
Gambar 2.3 Kerangka Pikir	23
Gambar 4.1 Realisasi Belanja Modal Provinsi Sumatera Barat (miliar rupiah) Tahun 2013-2017	39
Gambar 4.2 Realisasi Belanja Modal Provinsi Jambi (miliar rupiah) Tahun 2013-2017	40
Gambar 4.3 Realisasi Belanja Modal Provinsi Bengkulu (miliar rupiah) Tahun 2013-2017	43

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Hasil Regresi <i>Pooled Least Square</i>	75
Lampiran 2 Hasil Regresi <i>Fixed Effect Model</i>	76
Lampiran 3 Hasil Regresi <i>Random Effect Model</i>	77
Lampiran 4 Hasil Regresi Uji Chow.....	79
Lampiran 5 Hasil Regresi Uji Hausman	80
Lampiran 6 Intersep antar Kabupaten/Kota Tiga Provinsi di Pulau Sumatera	81
Lampiran 7 Jumlah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017.....	82
Lampiran 8 Jumlah Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi Tahun 2013-2017.....	83
Lampiran 9 Jumlah Kabupaten dan Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2013-2017.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan (Riduansyah, 2003). Otonomi daerah membuat kemandirian untuk membentuk suatu daerah secara optimal dan tidak bergantung lagi kepada pemerintah pusat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik terhadap masyarakat serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki suatu daerah serta memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif di daerah (Adyatma & Oktaviani, 2015).

Pelaksanaan otonomi daerah membuat peluang bagi pemerintah daerah untuk dapat mengembangkan potensi pada daerah tersebut. Pemerintah daerah meningkatkan anggaran belanja modal untuk membiayai dalam mengembangkan potensi daerah. Sumber dana yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam peningkatan anggaran belanja modal tersebut antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil (DBH) (Wandira, 2013)

Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan dependensif terhadap kebutuhan,

potensi maupun karakteristik dan kebutuhan masyarakat di daerah (Syukri & Hinaya, 2019)

Proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita penduduk dalam suatu masyarakat dalam jangka panjang adalah defenisi dari pembangunan ekonomi. Dalam defenisi tersebut terdapat tiga unsur yaitu (1) pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus-menerus yang di dalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru, (2) usaha meningkatkan pendapatan per kapita, (3) kenaikan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang (Suryana, 2000). Apabila pembangunan terus berkembang akan mendorong pengeluaran pemerintah antara lain berupa belanja modal. Peningkatan pengeluaran pemerintah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Adyatma & Oktaviani, 2015)

Indikator penting salah satunya dalam mengetahui kondisi suatu ekonomi pada suatu daerah dalam satu periode tertentu yaitu data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku dalam satu periode tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya adalah jumlah dari nilai tambah yang berasal dari seluruh unit usaha dalam daerah tertentu atau merupakan penjumlahan dari jasa akhir (neto) dan nilai barang dari seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun yaitu gambaran dari PDRB atas dasar harga berlaku. Nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu yang digunakan sebagai dasar adalah gambaran dari PDRB atas dasar harga konstan. Pergeseran

dan struktur ekonomi dapat diketahui dengan menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku sedangkan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan (Badan Pusat Statistik, 2018)

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan di Pulau Sumatera Periode 2013-2017 (Persen)

Provinsi	Tahun					Rata-Rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Aceh	2,65	1,55	-0,73	3,30	4,19	2,19
Sumatera Utara	6,07	5,23	5,11	5,17	5,12	5,34
Sumatera Barat	6,08	5,88	5,53	5,27	5,29	5,61
Riau	2,48	2,71	0,22	2,23	2,71	2,07
Jambi	6,84	7,36	4,21	4,37	4,64	5,48
Sumatera Selatan	5,48	4,79	4,42	5,04	5,51	5,05
Bengkulu	6,07	5,48	5,14	5,29	4,97	5,39
Lampung	5,77	5,08	5,13	5,15	5,17	5,26
Kep. Bangka						
Belitung	5,20	4,67	4,08	4,11	4,51	4,51
Kep. Riau	7,21	6,60	6,02	5,02	2,01	5,37

Sumber : Badan Pusat Statistika, 2018 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi berfokus pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat (Sanusi, 2004). Pada Tabel 1.1 menunjukkan laju pertumbuhan PDRB cenderung berfluktuatif setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dan Jambi pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari sebelumnya sebesar 0,23 persen dan 0,88 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 setiap provinsi di Pulau Sumatera mengalami penurunan kecuali Provinsi Lampung yang mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 0,05 persen.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 provinsi-provinsi di Pulau Sumatera terjadi peningkatan dari sebelumnya kecuali Provinsi Sumatera Barat

dan Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami penurunan sebesar 0,26 persen dan 1 persen. Pertumbuhan ekonomi yang tertinggi pada tahun 2017 yaitu Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,51 persen meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,47 persen. Rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sumatera pada periode 2013-2017 yaitu dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,61 persen hal ini disebabkan meningkatnya lapangan usaha pertanian yang menjadi kontribusi terbesar Provinsi Sumatera Barat meningkat yang pada awalnya di tahun 2016 sebesar 2,01 persen meningkat menjadi sebesar 3,40 persen.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua adalah Provinsi Jambi yaitu sebesar 5,48 persen hal ini didukung oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB dan diikuti pula oleh sektor pertambangan dan penggalian. Provinsi Bengkulu merupakan wilayah tertinggi ketiga dengan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39 persen didukung oleh industri pengolahan karet mentah menjadi bahan setengah jadi atau *Crumb Rubber* dan memiliki lebih dari lima perusahaan besar penghasil karet termasuk PT. Perkebunan Nusantara VII dan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).

Penelitian ini dilakukan di tiga provinsi tertinggi berdasarkan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera yaitu terdiri dari Provinsi Sumatera Barat yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yaitu sebesar 5,61 persen. Provinsi Jambi memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yaitu sebesar 5,48 persen dan Provinsi Bengkulu memiliki rata-rata

pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yaitu sebesar 5,39 persen.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi periode 2013-2017 di Provinsi Sumatera Barat berfluktuatif dimana pada tahun 2014 mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar 0,2 persen hingga tahun 2016 terus mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,26 persen kemudian di tahun terakhir mengalami kenaikan dari sebelumnya sebesar 0,02 persen. Perkembangan pertumbuhan ekonomi periode 2013-2017 di Provinsi Jambi juga berfluktuatif pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,52 persen kemudian turun di tahun 2015 sebesar 3,15 persen, dan meningkat pada tahun 2016 sebesar 0,16 persen, pertumbuhan ekonomi kembali mengalami kenaikan sebesar 0,27 persen. Sementara itu, pada tahun 2013 sampai pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu mengalami penurunan dari tahun 2013 hingga tahun 2015 sebesar 0,93 persen.

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat periode 2013-2014 cenderung fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Sumatera Barat jika dilihat dari rata-rata dalam kurun waktu lima tahun yaitu Kota Padang sebesar 6,40 persen. Pertumbuhan ekonomi terendah di Provinsi Sumatera Barat jika dilihat dari rata-rata dalam kurun waktu lima tahun yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 5,34 persen.

Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Sumatera Barat Periode 2013-2017 (Persen)

KAB/KOTA	Tahun					Rata-Rata (%)
	2013	2014	2015	2016	2017	
Limapuluh Kota	6,23	5,98	5,61	5,32	5,34	5,70
Agam	6,15	5,92	5,52	5,41	5,43	5,69
Kepulauan Mentawai	5,77	5,57	5,20	5,02	5,13	5,34
Padang Pariaman	6,20	6,05	6,14	5,52	5,59	5,90
Pasaman	5,82	5,87	5,34	5,07	5,09	5,44
Pesisir Selatan	5,90	5,80	5,73	5,33	5,42	5,64
Sijunjung	6,14	6,02	5,69	5,26	5,27	5,68
Solok	5,63	5,79	5,44	5,31	5,33	5,50
Tanah Datar	5,85	5,79	5,33	5,03	5,12	5,42
Bukit Tinggi	6,28	6,20	6,14	6,05	6,08	6,15
Padang Panjang	6,29	6,08	5,91	5,80	5,81	5,98
Padang	6,66	6,46	6,41	6,22	6,23	6,40
Payakumbuh	6,56	6,47	6,19	6,09	6,12	6,29
Sawahlunto	6,11	6,08	6,03	5,73	5,75	5,94
Solok	6,44	6,01	5,97	5,76	5,78	5,99
Pariaman	6,06	5,99	5,79	5,59	5,62	5,81
Pasaman Barat	6,40	6,04	5,70	5,33	5,35	5,76
Dharmasraya	6,51	6,34	5,75	5,42	5,45	5,89
Solok Selatan	6,13	5,90	5,35	5,12	5,15	5,53

Sumber : Badan Pusat Statistika, 2018 (diolah)

Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Jambi Periode 2013-2017 (Persen)

KAB/KOTA	Tahun					Rata-Rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Batanghari	6,48	7,56	4,27	4,65	4,81	5,55
Bungo	9,02	6,74	5,13	5,39	5,66	6,39
Kerinci	6,16	9,06	6,41	6,72	6,10	6,89
Merangin	6,45	7,13	5,40	6,22	5,40	6,12
Muaro Jambi	7,15	8,03	5,25	5,49	5,12	6,21
Sarolangun	7,61	5,20	3,59	4,26	4,41	5,01
Tanjung Jabung Barat	5,73	5,85	3,64	3,14	4,48	4,57
Tanjung Jabung Timur	4,57	5,81	1,81	2,65	3,09	3,59
Tebo	7,63	8,83	5,35	5,40	5,60	6,56
Jambi	8,50	8,17	5,12	6,84	4,68	6,66
Sungai Penuh	8,45	7,54	7,06	6,51	6,24	7,16

Sumber : Badan Pusat Statistika, 2018 (diolah)

Disamping itu, Tabel 1.3 menunjukkan bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi periode 2013-2014 cenderung fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 Kabupaten Batanghari mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,16 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Jambi jika dilihat dari rata-rata dalam kurun waktu lima tahun yaitu Kota Sungai Penuh sebesar 7,16 persen. Pertumbuhan ekonomi terendah di Provinsi Jambi jika dilihat dari rata-rata dalam kurun waktu lima tahun yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 3,59 persen.

Tabel 1.4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan di Bengkulu Periode 2013-2017 (Persen)

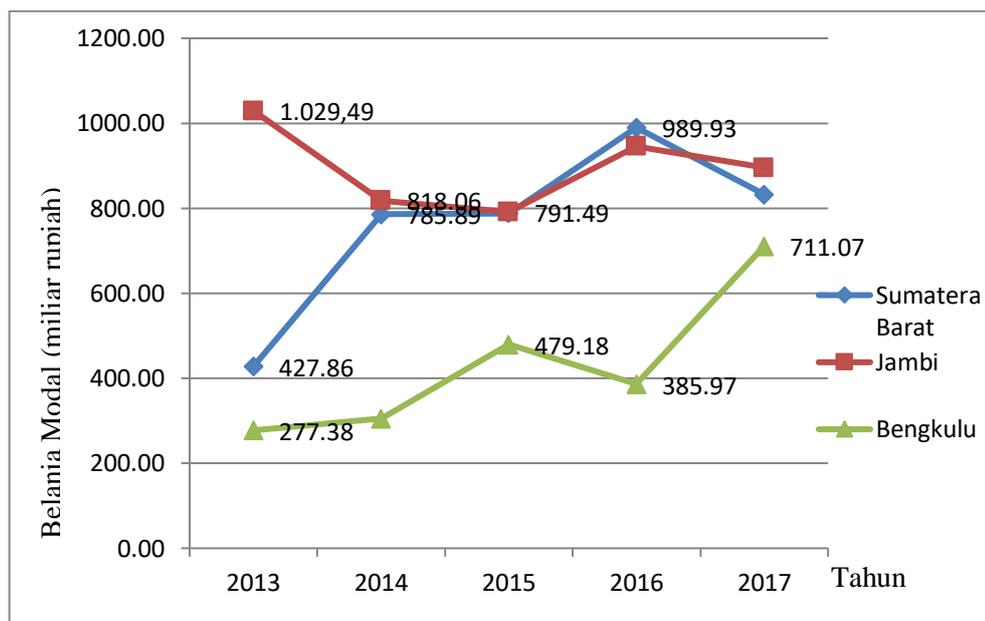
KAB/KOTA	Tahun					Rata-Rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Bengkulu Selatan	6,17	5,67	5,14	5,32	5,01	5,46
Bengkulu Utara	5,51	5,47	5,07	5,01	5,00	5,21
Rejang Lebong	5,98	5,30	5,15	5,27	5,01	5,34
Bengkulu	6,09	6,12	6,02	6,17	5,64	6,01
Kaur	6,09	4,82	4,96	5,34	5,11	5,26
Seluma	5,74	5,30	4,31	5,02	5,01	5,08
Mukomuko	6,36	6,01	5,54	5,69	5,31	5,78
Lebong	5,54	5,44	4,99	5,21	5,14	5,26
Kepahiang	6,23	5,89	5,65	5,71	5,23	5,74
Bengkulu Tengah	5,59	5,46	5,01	5,04	5,02	5,22

Sumber : Badan Pusat Statistika, 2018 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.4 menunjukkan bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu periode 2013-2014 cenderung fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Bengkulu jika dilihat dari rata-rata dalam kurun waktu lima tahun yaitu Kota Bengkulu sebesar 6,01 persen. Pertumbuhan ekonomi terendah di Provinsi Bengkulu jika dilihat dari rata-rata dalam kurun waktu lima tahun yaitu Kabupaten Seluma sebesar 5,08 persen.

Kota Bengkulu pada tahun 2013 sebesar 6,09 persen meningkat sebesar 0,03 persen menjadi 6,12 persen kemudian menurun sebesar 0,10 persen menjadi sebesar 6,02 persen. Tahun 2016 meningkat menjadi 6,17 persen meningkat sebesar 0,15 persen dan turun kembali menjadi 5,64 persen turun sebesar 0,53 persen.

Kabupaten Seluma tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 sebesar 5,74 persen dan mengalami penurunan sampai dengan tahun 2015 yang hanya menjadi sebesar 4,31 persen menurun sebanyak 1,43 persen. Mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi sebesar 5,02 persen.



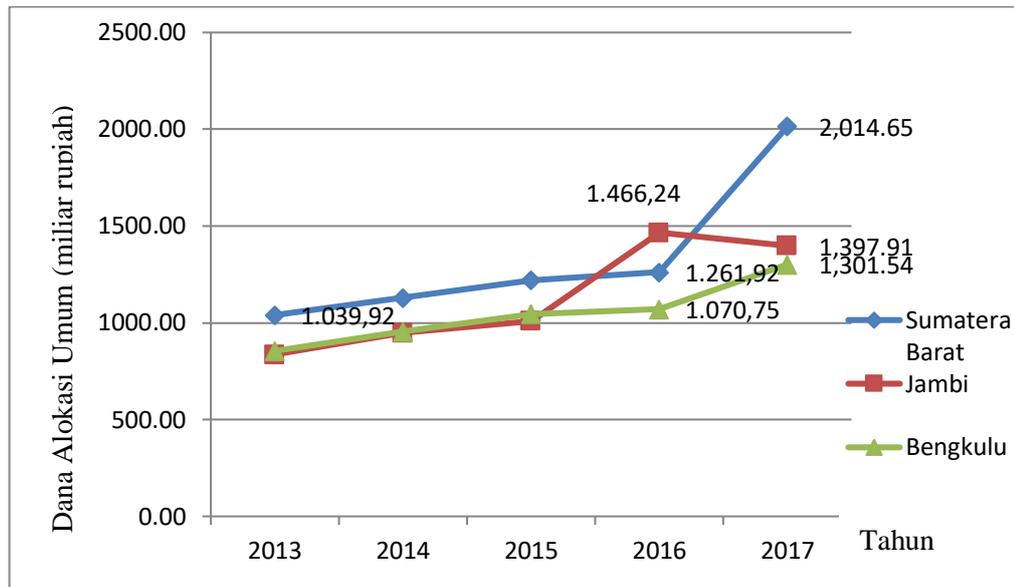
Gambar 1.1 Realisasi Belanja Modal Menurut Tiga Provinsi di Pulau Sumatera (miliar rupiah) Tahun 2013-2017

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak dan Keuangan, 2018 (diolah)

Gambar 1.1 menggambarkan realisasi belanja modal yang bersifat fluktuatif pada tiga provinsi di Pulau Sumatera. Belanja modal tertinggi dilakukan oleh Provinsi Jambi pada tahun 2013 sebesar Rp.1.029,49 miliar dan belanja

modal terendah dilakukan oleh Provinsi Bengkulu sebesar Rp.277,38 miliar. Pada tahun 2014 belanja modal tertinggi tetap dilakukan oleh Provinsi Jambi sebesar Rp.818,06 miliar menurun dari tahun sebelumnya sebesar Rp.211,43 miliar dan belanja modal terendah sampai dengan tahun 2016 masih dilakukan oleh Provinsi Bengkulu sebesar Rp.385,97 miliar akan tetapi terjadi peningkatan di tahun terakhir Provinsi Bengkulu meningkat sangat signifikan menjadi sebesar Rp.711,07miliar.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun, 2010belanja modal adalah belanja yang dilakukan oleh pemerintah suatu daerah yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun anggaran yang telah ditetapkan dan sekaligus memperbanyak kekayaan daerah tersebut atau aset yang kemudian akan meningkatkan belanja rutin antara lain seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Infrastruktur, peralatan, dan harta tetap lainnya merupakan aset tetap pemerintah suatu daerah yang didapatkan dari belanja modal.Nopiani (2016)membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.



Gambar 1.2 Realisasi Dana Alokasi Umum Menurut Tiga Provinsi di Pulau Sumatera (miliarrupiah) Tahun 2013-2017

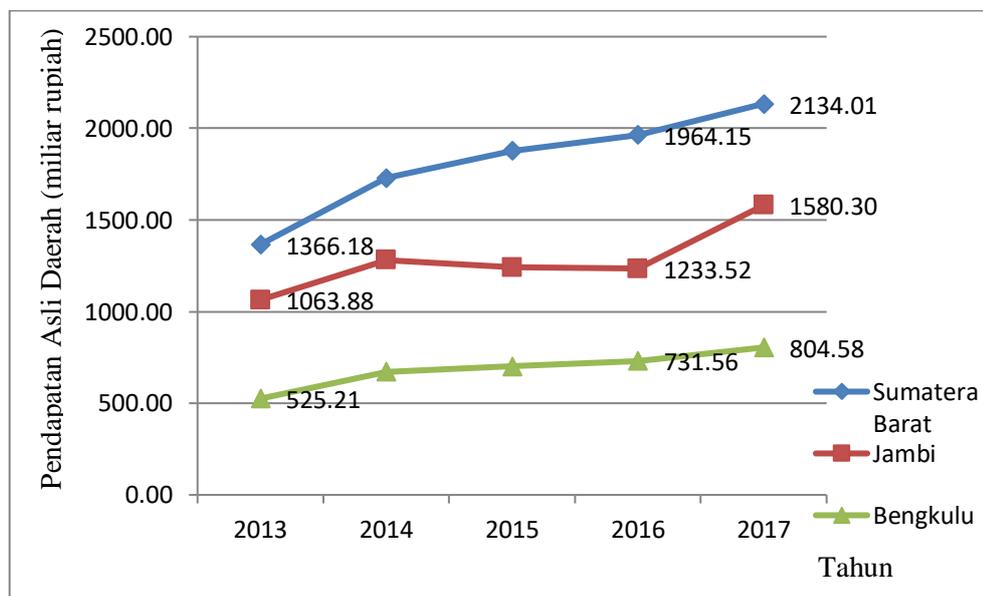
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak dan Keuangan, 2018 (diolah)

Gambar 1.2 menggambarkan realisasi dana alokasi umum menurut tiga provinsi di Pulau Sumatera yang cenderung setiap tahunnya mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali Provinsi Jambi yang mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi Rp.1.397,91 miliar menurun sebesar Rp.68,33 miliar dibandingkan tahun 2016. Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu yang melakukan peningkatan setiap tahunnya.

Pada tahun 2013 Provinsi Sumatera Barat memperoleh dana alokasi umum sebesar Rp.1.039,92 miliar meningkat di tahun berikutnya menjadi Rp.1.129,89 meningkat sebesar Rp.89,97 miliar, dan meningkat kembali di tahun 2015 menjadi Rp.1.221,13 miliar meningkat sebesar Rp.91,24 miliar. Tahun 2016 kembali meningkat menjadi sebesar Rp.1.261,92 miliar peningkatannya sebesar Rp.40,79 miliar, meningkat kembali sampai dengan tahun terakhir menjadi sebesar Rp.2.014,65 miliar.

Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan sebesar Rp.100,45 miliar dari tahun 2013 yang memperoleh dana alokasi umum sebesar Rp.854,65 miliar menjadi sebesar Rp.955,10 miliar di tahun 2014, kemudian meningkat sampai dengan tahun terakhir yaitu tahun 2017 menjadi sebesar Rp.1.301,54 miliar.

Dana alokasi umum dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dengan adanya dana tersebut kesenjangan antar daerah di suatu wilayah tersebut dapat diminimalisir sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan potensi daerah mereka masing-masing hal ini juga dibuktikan oleh Nopiani *et al.* (2016) yang membuktikan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.



Gambar 1.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Menurut Tiga Provinsi di Pulau Sumatera (miliar rupiah) Tahun 2013-2017

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak dan Keuangan, 2018 (diolah)

Gambar 1.3 menggambarkan realisasi pendapatan asli daerah menurut tiga provinsi di Pulau Sumatera yang mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali

pada tahun 2015 Provinsi Jambi mengalami sedikit penurunan menjadi Rp.1.241,24 miliar. Provinsi Sumatera Barat memiliki pendapatan asli daerah tertinggi diantara tiga provinsi di Pulau Sumatera dalam periode 2013-2017 yaitu sebesar Rp.2.134,01 miliar pada tahun terakhir dan mengalami peningkatan sebesar Rp.767,83 miliar dari tahun 2013. Posisi kedua yang memiliki pendapatan asli tertinggi adalah Provinsi Jambi sebesar Rp.1.580,30 miliar di tahun 2017 jika dibandingkan tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp.516,42 miliar. Provinsi Bengkulu yang memiliki pendapatan asli daerah terendah menurut tiga provinsi di Pulau Sumatera periode 2013-2017 yang hanya mengalami peningkatan sebesar Rp.279,37 miliar dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan menunjukkan bahwa keberhasilan suatu daerah dalam melengkapinya sekaligus memakmurkan masyarakatnya (Apriana & Suryanto, 2010).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh belanja modal, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tiga provinsi di Pulau Sumatera

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh belanja modal, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tiga provinsi di Pulau Sumatera.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Praktis : Penelitian ini memberikan masukan dan bahan informasi bagi dinas terkait untuk dipertimbangkan atau dapat memberikan kontribusi bagi kajian-kajian yang berhubungan dengan pengaruh belanja modal, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.
- 2) Manfaat Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah penelitian dan dapat digunakan sebagai acuan atau sebagai pembanding untuk penelitian selanjutnya.
- 3) Manfaat Akademis : Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa sehubungan dengan pengaruh antara belanja modal, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tiga provinsi di Pulau Sumatera.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 4(2), 190–205.
- Anita dan Aprilianto. (2017). 1081 | Proceeding ICONPO VII: August 2017. *Proceeding ICONPO*, 1080–1095.
- Apriana, D., & Suryanto, R. (2010). Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 11(1), 68–79.
- Astria, S. (2014). Ekonomi pembangunan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 42–54.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Usaha, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan*.
- Badrudin. (2011). Effect Of Fiscal Decentralization On Capital Expenditure, Growth, And Welfare. *Economic Journal of Emerging Markets*, 3(3), 211–213.
- Barimbing, Y. R., & Karmini, N. L. (2015). Pengaruh PAD, Tenaga Kerja dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(5), 434–450.
- Bose et al. (2007). Public Expenditure and Economic Growth: A Disaggregated Analysis For Developing Countries. *The Manchester School*, 75(5), 533–556.
- Dewi, N., & Suputra, I. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1745–1773.
- Dilliana et al. (2019). *Regional Financial Performance Mediates the Effect of Regional Balance Funds and Expenditures on Economic Growth*. 6(6), 164–171.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk). (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tentang Dana Perimbangan*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk). (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Gani, W., & Kristanto, S. B. (2013). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Jurnal InFestasi*, 9(2), 115–122.

- Gujarati, D. N. (2003). *Ekonometri Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Mangkoesebroto, G. (2001). *Ekonomi Publik* (3 ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Mawarni dkk. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 2(2), 80–90.
- Muda and Hutapea. (2018). Influence of capital expenditure and income original region to the income per capita in Indonesia Influence of capital expenditure and income original region to the income per capita in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/>
- Mulyani. (2016). The Relationship of Local Own Revenues and General Fund Allocation on Capital Expenditure of Local Government. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 15, 163–166.
- Nopiani, et al. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen*, 4.
- Nurmainah, S. (2013). Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah ,Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan (Studi kasus 35 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 20(2), 131–141.
- Pujiati, A. (2008). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang*, 13(2).
- Putri. (2014). PENGARUH INVESTASI, TENAGA KERJA, BELANJA MODAL, DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PULAU JAWA. *Journal of Economics and Policy*, 7(708). <https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596>
- Putri. (2015). Vol. 5, No. 2, Oktober 2015 E S E N S I Jurnal Bisnis dan Manajemen. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2).
- Riduansyah, M. (2003). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). *Makara, Sosial Humaniora*, 7(2).
- Rizky et al. (2016). Pengaruh Penanaman Modal Asing , Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia. *JESP*, 8(1), 9–16.

- Sanusi, B. (2004). *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Setiyawati, A., & Hamzah, A. (2007). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211–228.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* (Kedua). Jakarta.
- Sumarsono, H., & Rahmawati, F. (2017). *The Phenomenon Flypaper Effect in Balanced Funds , Regional Revenue and Surplus Budget Funding of Economic Growth and Regional Expenditure in Districts / City East Java Province*. 8(1), 42–52. <https://doi.org/10.9790/5933-0801024252>
- Suryana. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan* (Pertama). Jakarta: Salemba Empat.
- Susanto, W., & Sugianto, C. (2019). The Structure of Regional Original Revenue and Its Effect on Economic Growth: Facts from Regencies and Cities in Central Jawa. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 3(1).
- Syam et al. (2016). Influence of PAD and DAU on Economic Growth with Capital Expenditure as an Intervening Variable on Regency and Municipal Government in South Kalimantan Province. *Journal Research and Analysis: Economy*, 1–9.
- Syukri, M., & Hinaya, H. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMMA / Journal of Economic, Management and Accounting*, 2(2), 30.
- Wandira, A. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).
- Widjaja. (2007). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

